**BAB I. PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Pelaksanaan otonomi daerah dalam perjalanannya telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap daerah memiliki kewenangan yang besar untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan daerahnya, namun dalam konteks desentralisasi pembangunan tersebut tetap sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 2 ayat 2 UU SPPN mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan berjangka secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. Rencana pembangunan berjangka tersebut antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kalimantan Timur yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program prioritas Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018 dan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2018. RPJMD Kalimantan Timur selanjutnya menjadi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kalimantan Timur lima tahun kedepan yang dalam penyusunan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa perencanan pembangunan dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 didasarkan pada pertimbangan objektif sesuai dengan karakteristik wilayah yang menjadi isu-isu strategis yang difokuskan pada tujuan pembangunan berkelanjutan, dan merupakan tahapan 5 tahunan keempat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan”.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang kemudian akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahun.

* 1. **Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur**

**Tahun 2019-2023**

Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2019–2023 berpijak pada nilai yang berkembang di masyarakat, visi dan tahapan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur periode 2005-2025, capaian kondisi pembangunan daerah, serta proyeksi pembangunan lima tahun mendatang. Visi Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 “Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan dengan didukung melalui misi:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, kedepan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam tidak terbarukan tetapi lebih kepada sumber daya alam terbarukan yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Perwujudan keseimbangan tersebut melalui model pembangunan ekonomi hijau dengan dimensi-dimensi penting antara lain pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ekosistem produktif yang terjaga sebagai penyedia jasa lingkungan, pertumbuhan yang adil dan merata (inklusif), ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Tahapan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 terdapat Penekanan yang menjadi acuan dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun tahapan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 5 tahunan adalah:

Tabel 1.1

Tahapan 5 Tahun RPJPD dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

| **Penekanan 5 Tahun Pertama (2005-2008)** | **Penekanan 5 Tahun Kedua (2009-2013)** | **Penekanan 5 Tahun Ketiga (2014-2018)** | **Penekanan 5 Tahun Keempat (2019-2023)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga dalam jangka panjang memiliki daya saing yang tinggi; pengembangan ekonomi diarahkan pada pembentukan struktur ekonomi yang mapan dan lebih berpihak pada rakyat banyak; infrastruktur dasar lebih mendukung arah pengembangan kawasan prioritas; pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berjalan dengan lebih efisien dan efektif, dan hukum lebih diutamakan; serta penataan ruang menjadi dasar kebijakan pembangunan dengan mengedepankan kelestarian alam dan lingkungan.  **Kata kunci:**  Menyiapkan fondasi/meletakkan dasar | Penguatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai berjalan, pengembangan perekonomian telah mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu-hilir. Lingkungan mulai terkendali. Prasarana dasar pembangunan semakin memiliki peran dalam pemerataan dan mendorong pertumbuhan wilayah, Pelaksanaan pembangunan makin menunjukkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dengan partisipasi yang makin meningkat serta penataan ruang dijadikan sebagai dasar pijakan pembangunan daerah.  **Kata kunci:** Membangun/melanjutkan pembangunan di atas fondasi/dasar yang telah diletakkan. | Kualitas SDM semakin meningkat, kebergantungan ekonomi pada sumberdaya alam yang tidak terbarukan mulai berkurang, sedangkan pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan semakin berkembang, dan struktur ekonomi semakin mantap. Prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah pedalaman, pemerintahan berjalan makin efisien, efektif, dan transparan. Selanjutnya penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah, serta kualitas lingkungan secara global semakin terkendali dan terus meningkat kualitasnya.  **Kata kunci:** Mendayagunakan dan menguatkan yang telah dibangun. | Peningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.  **Kata Kunci:** Menguatkan dan mengoptimalkan yang telah di dayagunakan untuk mewujudkan cita-cita. |

Pada periode 2019-2023, Provinsi Kalimantan Timur berada dalam tahapan pembangunan yang ke-4 sesuai dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Tahapan ini menekankan pembangunan untuk peningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi”. Oleh karena itu pemerintah daerah maupun masyarakat harus berperan aktif dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk mencapai kemajuan daerah.

## **Visi Daerah**

Berdasarkan pada hasil analisis permasalahan dan isu strategis serta visi RPJPD Tahun 2005-2025 Provinsi Kalimantan Timur telah selaras dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2019-2023 yaitu:”Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”. Visi tersebut mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

**Tabel 1.2.**

**Sinergi Visi RPJPD 2005-2025, RPJMN 2015-2019 dan**

**RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Visi RPJPD 2005-2025** | **Visi RPJMN 2015-2019** | **Visi RPJMD 2019-2023** |
| Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan | Terwujudnya Indonesia yang **Berdaulat**, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong | Berani untuk Kalimantan Timur **Berdaulat** |

Adapun penjelasan visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dapat terlihat pada Tabel 1.3 di bawah ini.

**Tabel 1.3.**

**Penjelasan Visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**

| **Pernyataan Visi** | **Pokok-pokok Visi** | **Penjelasan Visi** |
| --- | --- | --- |
| Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat | Berani | Pemerintahan mempunyai keberanian, tekad dan komitmen yang kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundangan untuk mensejahterakan masyarakat |
| Berdaulat | Kalimantan Timur memiliki **kemantapan** dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik |
| Kalimantan Timur mampu mewujudkan **kemandirian** dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar |
| Kalimantan Timur mampu mewujudkan **kemandirian** dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan |
| Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki **daya saing** |

**Misi Daerah**

Dalam rangka mewujudkan visi Gubenur dan Wakil Gubenur Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, ditetapkan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang yaitu:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Penjelasan masing-masing dari misi di atas diuraikan sebagai berikut:

**Misi 1 : Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas**

Kalimantan Timur memiliki kekayaan alam yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, namun dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai. Tidak meratanya distribusi jumlah dan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur menjadi tantangan yang perlu dikedepankan, agar semakin meningkatkan daya saing provinsi, baik secara regional, nasional dan internasional.

Perkembangan global, baik politik maupun teknologi, dapat memberikan dampak yang nyata dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Kalimantan Timur. Rendahnya produktivitas menjadi tantangan, yang dapat dijawab melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, dan penerapan pengetahuan dan teknologi yang lebih efektif dan efisien berdampak rendah terhadap lingkungan hidup.

Arah kebijakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi melalui pengembangan pendidikan secara merata di Provinsi Kalimantan Timur baik pendidikan formal di sekolah, pendidikan vokasi, maupun pendidikan informal di luar sekolah. Peran serta perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas semakin ditingkatkan, untuk memberikan keadilan bagi seluruh warga Kalimantan Timur. Sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi saja tidak cukup akan tetapi diperlukan juga sumber daya manusia yang berakhlak mulia untuk membentuk identitas dan karakter manusia yang berkualitas. Pendidikan agama dan integrasi budaya lokal penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan pembangunan daerah.

Dengan demikian rencana pembangunan sumber daya manusia Kalimantan Timur bersifat komprehensif dengan mempertimbangkan baik aspek jasmani (pangan, sandang, dan perumahan) maupun aspek rohani (pendidikan karakter, mental dan spiritual) sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki, lingkungan sosial maupun kultural daerah.

**Misi 2 : Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan**

Perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sejak beberapa dasawarsa telah melalui beberapa fase perkembangan ekonomi yang kurang kokoh dan berkualitas. Dalam hal penciptaan Nilai Tambah Bruto (NTB), perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh sektor primer. Peranan sektor primer menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sementara peranan sektor sekunder terus menurun pada kurun yang sama. Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih mengandalkan produk barang mentah (*raw material*) dan belum pada barang olahan (*processed product*). Sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan memiliki peran dominan dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

Produktivitas kawasan yang rendah, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan bercadangan karbon rendah, utamanya untuk kehutanan dan perkebunan, serta belum optimalnya produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan, menjadi tantangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Belum terbangunnya industri hilir (sekunder-tersier) hasli pertanian dalam arti luas, menjadikan nilai tambah komoditi Kalimantan Timur belum memberikan hasil yang optimum. Selain itu, belum adanya terminal-terminal distribusi hasil pertanian dalam arti luas, dan belum tersedianya sentra industri perikanan, menjadikan Kalimantan Timur kehilangan potensi pendapatan daerah.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah masih menjadi persoalan dalam kegiatan ekonomi Kalimantan Timur. Kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur relatif masih tinggi. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat karena peningkatan pembangunan daerah tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk secara merata. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, pendidikan, dan berbagai modal lainnya. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk adalah rasio Gini. Rasio Gini Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun 2013-2017 berfluktuasi dan memperlihatkan kecenderungan stabil pada angka 0,33. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur juga relatif masih melebar.

Dalam konteks mewujudkan daya saing ekonomi**,** tantangan yang dihadapi adalah membangun keterkaitan antara hulu dan hilir dari komoditas-komoditas unggulan sebagai basis perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada masa mendatang. Percepatan transformasi ekonomi menuju keseimbangan permintaan antara dan permintaan akhir merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian wilayah Provinsi Kalimantan Timur sehingga perlu adanya perubahan pola pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dalam pengembangan ekonomi wilayah. Selain itu, upaya mempersiapkan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih seimbang antara ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan dengan sumber daya alam terbarukan secara sistematis dibutuhkan upaya keras yang terintegrasi mewujudkan ketahanan pangan, pengembangan komoditas agroindustri unggulan dan andalan yang strategis, serta mengoptimalkan produksi perikanan dan kelautan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan strategi besar pembangunan dengan fokus pada struktur ekonomi berbasis sekunder dan tersier. Di masa mendatang, Provinsi Kalimantan Timur mendorong lahirnya industri hilir agar hasil eksploitasi sumber daya alam yang diproduksi di Provinsi Kalimantan Timur tidak diekspor dalam bentuk mentah namun sudah dalam bentuk produk olahan baik berupa barang setengah jadi maupun barang jadi dengan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal.

Hal yang ingin dicapai dalam konteks ekonomi yang berkerakyatan dalam misi kedua adalah terciptanya sistem ekonomi partisipatif yang meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan akses sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat baik dalam proses produksi, distribusi, maupun konsumsi. Upaya bantuan modal usaha, pendampingan teknis dan manajerial, serta bantuan pemasaran pada usaha kecil dan menengah akan semakin ditingkatkan. Ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya dan strategi untuk lebih mengedepankan masyarakat dalam membangun kesejahteraannya, serta memperkuat BUMDES sebagai penggerak perekonomian pedesaan. Pembangunan dan pengembangan ekonomi harus berakar pada ekonomi kerakyatan namun tetap mengacu pada pertumbuhan, pemerataan, stabilitas, dan peningkatan sumber daya manusia dengan cara mempercepat proses perubahan dari masyarakat yang masih berfikir dan berperilaku tradisional ke masyarakat modern; dari sistem ekonomi subsistem ke ekonomi pasar; dan dari masyarakat yang tergantung ke masyarakat yang mandiri. Penyelesaian konflik antara masyarakat dan perusahaan dilakukan melalui berbagai skema yang dimungkinkan di dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam menguatkan kemitraan antara perusahaan dengan kelompok ekonomi masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan rakyat tak lagi bertumpu pada dominasi pemerintah pusat, modal asing, dan perusahaan konglomerasi, melainkan pada kekuatan pemerintah daerah, persaingan yang berkeadilan, kepastian berusaha, dukungan permodalan dan teknologi, usaha pertanian rakyat, serta peran BUMDES dan koperasi sejati yang diharapkan mampu berperan sebagai fondasi penguatan ekonomi rakyat. Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi dalam melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan dibawah kepemimpinan dan kepemilikan anggota masyarakat.

**Misi 3 : Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan**

Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sejauh mana komitmen dan usaha pemerintah suatu daerah dalam menyediakan fasilitas infrastruktur secara merata. Kualitas infrastruktur yang belum memadai menjadi problem daya saing di Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci perkembangan suatu wilayah, dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan infrastrukur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat secara merata dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan jalan dengan kapasitas di atas 10 Ton pada jalan provinsi dan jalan produksi lainnya dalam rangka menghubungkan sentra-sentra produksi dan kawasan pertumbuhan ekonomi menuju pusat pemasaran outlet. Penyediaan transportasi udara dan laut yang handal serta representatif untuk meningkatkan arus barang dan jasa dari dan ke Provinsi Kalimantan Timur, sebagai upaya pembukaan keterisolasian wilayah dengan dikembangkannya sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan dermaga, pembangunan bandar udara serta penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi. Disamping itu pemenuhan kecukupan layanan air minum, air baku untuk jaringan irigasi dan kawasan industri serta infrastruktur pertanian melalui peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan, penyediaan perumahan sederhana, layak huni dan sehat diarahkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam konteks energi terbarukan, misi ini tidak terlepas dari konsep pembangunan ekonomi hijau. Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan strategi besar mewujudkan ketahanan energy melalui pengembangan sumber energi baru terbarukan (EBT).

**Misi 4 : Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan**

Tranformasi ekonomi berbasis *unrenewable resources* ke *renewable resources* harus dilakukan dengan mewujudkan keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam perencanaan pembangunan menuju ekonomi hijau. Diharapkan transformasi pembangunan menuju ekonomi hijau atau ekonomi yang rendah karbon akan mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial serta mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekologi.

Sebagai upaya untuk mendukung ekonomi hijau, maka komitmen terhadap perbaikan lingkungan, rasionalisasi dan harmonisasi penataan ruang (RTRW) untuk memberikan jaminan terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi dan ekosistem menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kualitas lingkungan menjadi salah satu upaya *balancing* terhadap pembangunan ekonomi agar berdimensi “berkelanjutan”. Fenomena iklim saat ini tidak bisa terprediksi sehingga adaptasi terhadap perubahan iklim mutlak dilakukan, khususnya yang terkait dengan strategi pembangunan sektor kesehatan, pertanian, permukiman, dan tata ruang. Dalam rangka mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mulai menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Masyarakat juga harus terlibat langsung dalam upaya menjaga dan merawat lingkungan di masa perubahan iklim yang tidak menentu ini.

Upaya lain yang dilakukan adalah meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam mengantisipasi risiko bencana, agar dapat memiliki kesiapsiagaan, sarana-prasarana pencegahan, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana, serta memastikan pemulihan pasca bencana yang lebih baik, yang keseluruhnya diintegrasikan dalam perencanaan keruangan (RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota dan Rencana Rinci Tata Ruang kawasan hingga tingkat Desa), rencana pembangunan (RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten/Kota, dan RPJM Desa), serta sektor-sektor lainnya, seperti infrastruktur, pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

**Misi 5 : Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik**.

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar *good governance*. Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Setidaknya ada Sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu; 1) Tidak ada korupsi; 2) Tidak ada pelanggaran hokum; 3) APBD baik; 4) Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik; 5) Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada overlap; 6) Komunikasi dengan publik berjalan baik; 7) Penggunaan waktu efektif dan produktif; 8) Adanya *reward* dan *punishment* terhadap kinerja aparat pemerintah; dan 9) Hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah provinsi melakukan harmonisasi dengan pemerintahan kabupaten/kota, pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah. Upaya untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui keterbukaan layanan informasi publik dan menguatkan akuntabilitas serta kecepatan layanan perijinan, sehingga tingkat kepuasan masyarakat dapat semakin meningkat.

## **Tujuan dan Sasaran**

Visi dan misi dioperasionalisasikan menjadi rumusan tujuan dan sasaran. Rumusan tujuan memperlihatkan operasionalisasi upaya pencapaian misi, sedangkan sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dari pelaksanaan tujuan. Rumusan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

**Tabel 1.4**

**Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD**

**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**

**Visi ; Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat**

| **No** | **Misi** | **Tujuan/Sasaran** | **Indikator Kinerja** | **Kondisi Awal** | **Tahun** | | | | | **Kondisi Akhir** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN DAN PENYANDANG DISABILITAS | **Tujuan 1:** Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 75,12 | 75,30 | 75,43 | 75,56 | 75,76 | 76,87 | 76,87 |
| **Sasaran 1:**  Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat | Indeks Demokrasi Indonesia | 72,86 | 73,50 | 74,50 | 75,50 | 76,50 | 77,50 | 77,50 |
| **Sasaran 2:**  Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat | Rata-rata lama sekolah (Tahun) | 9,36 | 9,40 | 9,50 | 9,60 | 9,70 | 9,80 | 9,80 |
| Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 13,49 | 13,89 | 14,13 | 14,34 | 14,73 | 14,96 | 14,96 |
| **Sasaran 3:**  Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat | Usia Harapan Hidup (Tahun) | 73,7 | 73,72 | 73,74 | 73,76 | 73,78 | 73,8 | 73,8 |
| **Tujuan 2 :** Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat | Tingkat Kemiskinan (%) | 6,19 | 6,00 | 5,94 | 5,87 | 5,78 | 5,70 | 5,70 |
| **Sasaran 4:** Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%) | 56,64 | 56,70 | 56,71 | 56,72 | 56,73 | 56,75 | 56,75 |
| **Sasaran 5:** Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda | Indeks Pembangunan Pemuda | 56,33 | 56,74 | 57,23 | 57,82 | 58,27 | 58,86 | 58,86 |
| **Sasaran 6:** Meningkatnya daya saing tenaga kerja | Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 |
| 2 | BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN | **Tujuan 3:** Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 3,13 | 3,5±1 | 3,5±1 | 3,5±1 | 3,5±1 | 3,5±1 | 3,5±1 |
| **Sasaran 7:** Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM | Persentase Sumbangan Koperasi Terhadap PDRB (%) | - | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 4,70 | 4,80 | 4,80 |
| **Sasaran 8:** Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal (desa) | 518 | 503 | 478 | 448 | 413 | 368 | 368 |
| **Sasaran 9:** Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%) | 0,93 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 1,01 | 1,03 | 1,03 |
| **Tujuan 4:** Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan | Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Non Batubara (%) | 5,24 | 6±1 | 6±1 | 6±1 | 6±1 | 6±1 | 6±1 |
| **Sasaran 10:** Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah | Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%) | 18,33 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| **Sasaran 11:** Meningkatnya realisasi investasi | Nilai realisasi investasi (Rp Triliun) | 25,53 | 31,5 | 33,08 | 34,73 | 36,47 | 38,29 | 38,29 |
| **Sasaran 12:** Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah | Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%) | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,57 |
| Rasio Pemenuhan Beras (%) | 62,82 | 62,46 | 67,41 | 72,69 | 78,40 | 84,53 | 84,53 |
| **Sasaran 13:** Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah | Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%) | 0,3 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,37 |
| **Sasaran 14:** Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah | Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%) | 4,49 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6 | 6,3 | 6,3 |
| **Sasaran 15:** Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah | Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%) | 1,46 | 1,52 | 1,58 | 1,64 | 1,71 | 1,78 | 1,78 |
| **Sasaran 16:** Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah | Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%) | 1,15 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,2 |
| **Sasaran 17:** Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah | Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah (%) | -8,16 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| 3 | BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN | **Tujuan 5 :** Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar | Indeks Gini | 0,330 | 0,330 | 0,329 | 0,328 | 0,327 | 0,326 | 0,326 |
| **Sasaran 18:** Meningkatnya aksesibilitas wilayah | Jumlah penumpang yang terlayani (orang) | 10.392.536 | 10.705.000 | 11.026.000 | 11.536.200 | 11.700.000 | 12.050.000 | 12.050.000 |
| Jumlah barang (ton) | 325.051.663 | 334.805.000 | 344.850.000 | 355.200.000 | 365.900.000 | 376.900.000 | 376.900.000 |
| **Sasaran 19:** Meningkatnya konektivitas antar kawasan | Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (kawasan) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| **Sasaran 20:** Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air | Cakupan layanan air minum (%) | 71,83 | 73,33 | 75,00 | 77,00 | 81,00 | 85,00 | 85,00 |
| Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha) | 13.618,5 | 14.008,5 | 14.808,5 | 15.558,5 | 16.258,5 | 16.925,5 | 16.925,5 |
| Luas genangan banjir perkotaan (Ha) | 730 | 664 | 575 | 505 | 435 | 365 | 365 |
| **Sasaran 21:** Menurunnya kawasan kumuh | Luas Kawasan Kumuh (Ha) | 673,42 | 620,06 | 533,56 | 459,56 | 409,56 | 359,56 | 359,56 |
| **Sasaran 22:** Terpenuhinya kebutuhan energi daerah | Rasio elektrifikasi (%) | 84,21 | 85,50 | 87,50 | 89,50 | 92,00 | 95,00 | 95,00 |
| 4 | BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN | **Tujuan 6:** Meningkatkan kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 75,65 | 75,75 | 75,85 | 75,95 | 76,05 | 76,15 | 76,15 |
| **Sasaran 23:** Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) | Persentase penurunan emisi dari BAU (%) | 7,2 | 26,3 | 26,89 | 27,75 | 28,5 | 29,33 | 29,33 |
| **Sasaran 24:** Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana | Indeks Resiko Bencana | 0 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 125 |
| **Sasaran 25:** Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang | Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%) | 73,18 | 66,68 | 69,01 | 75,09 | 80,09 | 83,09 | 83,09 |
| 5 | BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK | **Tujuan 7:** Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik | Indeks Reformasi Birokrasi | B (68,93) | B (69,50) | B (70,50) | B (71,50) | B (72,50) | B (74,50) | B (74,50) |
| **Sasaran 26:** Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien | Nilai Akuntabilitas Kinerja | 77,49 | 77,50 | 78,00 | 78,50 | 79,00 | 80,00 | 80,00 |
| **Sasaran 27:** Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas | Skor Kepuasan Masyarakat (SKM) | 80,56 | 81 | 81,50 | 82 | 82,50 | 83 | 83 |
| **Sasaran 28:** Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel | Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda | Level 2 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 4 | Level 4 |

* 1. **Program Prioritas Pembangunan di Kalimantan Timur Tahun 2019**

Pencapaian indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah didukung oleh program prioritas yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Program-program pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2019-2023 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.5. Program Prioritas Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif**

| **Kode** | | | **Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah** | **Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)** | **Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)** | **Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | | | | | | | | **Perangkat Daerah Penanggung jawab** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | | **2020** | | | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD** | |
| **Target** | **Rp** | **Target** | **Rp** | | **Target** | **Rp** | | **Target** | **Rp** | | **Target** | **Rp** | **Target** | **Rp** |
|  |  |  | **MISI 1: Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **Tujuan 1: Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **Sasaran 1 : Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat** | **Indeks Demokrasi Indonesia** | **72.86** | **73.5** |  | **74.5** |  | | **75.5** |  | | **76.5** |  | | **77.5** |  | **77.5** |  |  |
| 1 | 5 | 21 | Program Pendidikan Politik Masyarakat | Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat (%) | 67,18 | 68 | 2,492,300,000 | 69 | 1,000,000,000 | | 70 | 1,075,000,000 | | 71 | 1,140,000,000 | | 72 | 1,260,000,000 | 72 | 6,967,300,000 | Kesbangpol |
| 1 | 1 | 41 | Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan | Jumlah sekolah yang mengembang-kan ekstrakurikuler berbasis agama (SMA/SMK/SLB) | 72 | 90 | 10,000,000,000 | 150 | 10,000,000,000 | | 233 | 10,000,000,000 | | 233 | 10,000,000,000 | | 233 | 10,000,000,000 | 233 | 50,000,000,000 | Disdikbud |
| 2 | 16 | 15 | Program Pengembangan Nilai Budaya | Jumlah sekolah mengembang-kan budaya lokal | 17 | 90 | 1,097,268,226 | 150 | 9,200,000,000 | 233 | | 9,200,000,000 | 233 | | 11,763,300,000 | 233 | | 17,028,200,000 | 233 | 48,288,768,226 | Disdikbud |
|  |  |  | **Sasaran 2 : Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat** | **Rata-rata lama sekolah (Tahun)** | **9,36** | **9,40** |  | **9,50** |  | | **9,60** |  | | **9,70** |  | | **9,80** |  | **9,80** |  |  |
|  |  |  | **Harapan Lama Sekolah (Tahun)** | **13,49** | **13,89** |  | **14,13** |  | | **14,34** |  | | **14,73** |  | | **14,96** |  | **14,96** |  |  |
| 1 | 1 | 42 | Program Pengembangan Sekolah Kejuruan | Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK) | 0 | 0 | 0 | 55 | 20,000,000,000.00 | | 70 | 20,000,000,000.00 | | 86 | 20,000,000,000.00 | | 86 | 20,000,000,000.00 | 86 | 80,000,000,000 | Disdikbud |
| 1 | 1 | 39 | Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Angka Partisipasi Murni SMA/MA | 68,23 | 69% | 117,863,785,000 | 72.00% | 136,940,000,000 | | 76.00% | 154,660,020,000 | | 78.00% | 163,543,900,000 | | 80.00% | 169,254,000,000 | 85 | 742,261,705,000 | Disdikbud |
| 1 | 1 | 39 | Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Angka Partisipasi Kasar SMK/MAK | 68,23 | 69% | 72,532,337,000 | 72.00% | 108,093,000,000 | | 76.00% | 224,257,023,420 | | 78.00% | 362,235,297,400 | | 80.00% | 447,616,363,500 | 85 | 1,214,734,021,320 | Disdikbud |
| 1 | 1 | 20 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi (%) | 95 | 96.00% | 6,828,750,000 | 98.00% | 14,770,000,000 | | 99.00% | 28,340,000,000 | | 100.00% | 30,349,000,000 | | 100.00% | 37,728,000,000 | 100 | 118,015,750,000 | Disdikbud |
| 1 | 1 | 23 | Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat | Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS yang berprestasi (orang) | 791 | 6500 | 80,016,703,000.00 | 13000 | 93,570,000,000.00 | | 19500 | 100,000,000,000.00 | | 26000 | 110,000,000,000.00 | | 31709 | 121,000,000,000 | 31709 | 504,586,703,000 | Disdikbud |
| 1 | 1 | 38 | Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan | Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa yang tidak putus sekolah (Siswa) | 635 | 2500 | 11,750,025,875 | 2500 | 77,943,407,000 | | 2500 | 53,718,361,600 | | 2500 | 57,855,561,600 | | 2500 | 30,180,000,000 | 2500 | 231,447,356,075 | Disdikbud |
| 1 | 2 | 107 | Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System) | Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (%) | 0 | 85.00% | 0 | 90.00% | 20,000,000,000.00 | | 95.00% | 20,000,000,000.00 | | 97.00% | 20,000,000,000.00 | | 100.00% | 20,000,000,000.00 | 100 | 80,000,000,000 | Disdikbud |
| 1 | 1 | 19 | Pendidikan Luar Biasa | Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%) | 60 | 65 | 8,060,811,000 | 70 | 23,793,195,800 | | 75 | 24,356,000,000 | | 80 | 40,689,400,000 | | 85 | 45,090,000,000 | 85 | 141,989,406,800 | Disdikbud |
| 2 | 2 | 21 | Peningkatan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak | Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%) | 70 | 76.00% | 223,985,000 | 82.00% | 200,000,000 | | 88.00% | 250,000,000 | | 94.00% | 300,000,000 | | 100% | 300,000,000 | 100 | 1,273,985,000 | Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Aanak |
| 2 | # | 23 | Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan | Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (on line dan on site) (orang) | 2,447 | 3,662 | 796,500,000 | 4,559 | 1,000,000,000 | | 5,771 | 1,125,000,000 | | 6,393 | 1,200,000,000 | | 70,323 | 1,500,000,000 | 70,323 | 5,621,500,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
|  |  |  | **Sasaran 3 : Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat** | **Usia Harapan Hidup (Tahun)** | **73,7** | **73,72** |  | **73,74** |  | | **73,76** |  | | **73,78** |  | | **73,80** |  | **73,80** |  |  |
| 1 | 2 | 56 | Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan | Persentase fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatannya | 50 | 60 | 1,441,700,240 | 70 | 653,350,000 | | 80 | 1,453,350,000 | | 90 | 1,822,938,500 | | 100 | 2,017,995,000 | 100 | 7,389,333,740 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2 | 23 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Persentase Puskesmas Minimal Terakreditasi Utama (%) | 6 | 15 | 2,385,297,500 | 43 | 2,500,000,000 | | 64 | 3,000,000,000 | | 96 | 5,412,331,760 | | 100 | 4,570,710,000 | 100 | 17,868,339,260 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 2 | 17 | Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan | Persentase Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan (%) | 87.5 | 87.5 | 41,478,068,000 | 90 | 41,500,000,000 | | 92 | 41,500,000,000 | | 95 | 41,000,000,000 | | 100 | 41,500,000,000 | 100 | 206,978,068,000 | Dinas Kesehatan |
|  |  |  | **Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **Sasaran 4 : Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan** | **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** | **56,64** | **56.7** |  | **56.71** |  | | **56.72** |  | | **56.73** |  | | **56.75** |  | **56.75** |  |  |
| 2 | 2 | 20 | Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Perempuan | Persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif (UEP) (%) | 34 | 37 | 158,900,000 | 40 | 650,000,000 | | 43 | 150,000,000 | | 46 | 160,000,000 | | 47 | 160,000,000 | 47 | 1,278,900,000 | Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Aanak |
| 2 | 2 | 35 | Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan Dan Anak | Rasio KDRT | 0,066 | 0,060 | - | 0,054 | 200,000,000 | | 0,048 | 250,000,000 | | 0,042 | 300,000,000 | | 0,038 | 350,000,000 | 0,038 | #VALUE! | Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Aanak |
| 1 | 6 | 23 | Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesejahteraan Sosial | Jumlah Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (Orang) | 300 | 1000 | 1,380,185,000 | 1500 | 1,375,203,500 | | 2500 | 1,518,203,500 | | 3000 | 1,518,203,500 | | 3500 | 1,518,203,500 | 3500 | 7,309,999,000 | Dinas Sosial |
| 1 | 6 | 18 | Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma | Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas (%) | 0 | 32 | 212,200,000 | 43.1 | 233,420,000 | | 45 | 233,420,000 | | 46.1 | 233,420,000 | | 47.5 | 233,420,000 | 47.5 | 1,145,880,000 | Dinas Sosial |
|  |  |  | **Sasaran 5 : Meningkat nya kewirausahaan dan prestasi pemuda** | **Indeks Pembangunan Pemuda** | **56,33** | **56,74** |  | **57,23** |  | | **57,82** |  | | **58,27** |  | | **58,86** |  | **58,86** |  |  |
| 2 | 13 | 33 | Program Peningkatan Prestasi Olahraga | Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi (%) | 0.00% | 10.00% | 3,911,650,000 | 14.44% | 3,500,000,000 | | 15.67% | 5,210,000,000 | | 13.42% | 7,225,000,000 | | 17.92% | 7,830,542,000 | 17.92% | 27,677,192,000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 2 | 13 | 35 | Peningkatan Upaya Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda | Persentase Pemuda yang Berwirausaha (%) | 0,03 | 0,09 | - | 0,15 | 1,478,200,000 | | 1 | 2,500,000,000 | | 1,5 | 3,000,000,000 | | 2 | 5,000,000,000 | 2 | 11,978,200,000 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
|  |  |  | **Sasaran 6 : Meningkatnya daya saing tenaga kerja** | **Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)** | **50** | **51** |  | **52** |  | | **53** |  | | **54** |  | | **55** |  | **55** |  |  |
| 2 | 1 | 15 | Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap di pasar kerja (%) | 80.00% | 80.00% | 6,957,500,000 | 80.00% | 8,007,500,000 | | 80.00% | 7,007,500,000 | | 80.00% | 7,357,875,000 | | 80.00% | 7,357,875,000 | 80.00% | 36,688,250,000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|  |  |  | **Misi 2 : BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **Tujuan 3 : Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **Sasaran 7 : Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM** | **Persentase Sumbangan Koperasi Terhadap PDRB (%)** | **-** | **4,40** |  | **4,50** |  | | **4,60** |  | | **4,70** |  | | **4,80** |  | **4,80** |  |  |
| 2 | 11 | 20 | Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM | Jumlah Koperasi yang berkualitas | 0 | 0 | - | 100 Koperasi | 3,424,608,000 | | 100 Koperasi | 3,733,608,000 | | 100 Koperasi | 4,033,608,000 | | 100 Koperasi | 4,333,608,000 | 400 Koperasi | 15,525,432,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| Jumlah UKM Naik Kelas | 0 | 0 | 200 UKM | 200 UKM | 200 UKM | 200 UKM | 800 UKM |
|  |  |  | **Sasaran 8 : Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan** | **Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal (desa)** | **518** | **503** |  | **478** |  | | **448** |  | | **413** |  | | **368** |  | **368** |  |  |
| 2 | 7 | 16 | Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan | Meningkatkan jumlah Bumdes yang aktif (Bumdes) | 302 | 20 | 148,045,000 | 25 | 670,000,000 | | 30 | 700,000,000 | | 35 | 720,000,000 | | 40 | 714,000,000 | 40 | 2,952,045,000 | DPMPD |
| 2 | 7 | 29 | Program Pembangunan Desa dan Kawasan | Meningkatkan jumlah desa berkembang (Desa) | 289 | 20 | 300,000,000 | 25 | 1,000,000,000 | | 30 | 1,080,000,000 | | 35 | 1,130,000,000 | | 40 | 1,125,000,000 | 40 | 4,635,000,000 | DPMPD |
| 2 | 7 | 28 | Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan | Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa) | 63 | 73 | 475,000,000 | 103 | 1,150,000,000 | | 138 | 1,242,000,000 | | 173 | 1,280,000,000 | | 213 | 1,295,000,000 | 213 | 5,442,000,000 | DPMPD |
| 2 | 7 | 30 | Program Kampung Iklim + | Jumlah kampung/desa (Desa) | 28 | 20 |  | 22 | 2,000,000,000 | | 25 | 1,250,000,000 | | 27 | 1,500,000,000 | | 28 | 1,650,000,000 | 28 | 6,400,000,000 | DPMPD |
|  |  |  | **Sasaran 9 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah** | **Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)** | **0.93** | **0.95** |  | **0.97** |  | | **0.99** |  | | **1.01** |  | | **1.03** |  | **1.03** |  |  |
| 3 | 2 | 16 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Jumlah Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya (kawasan) | 2 Kawasan | 2 Kawasan | 1,885,600,000 | 2 Kawasan | 2,800,000,000 | | 2 Kawasan | 3,050,000,000 | | 2 Kawasan | 3,050,000,000 | | 2 Kawasan | 3,050,000,000 | 2 Kawasan | 13,835,600,000 | Dinas Pariwisata |
|  |  |  | **Tujuan 4 : Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **Sasaran 10 : Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah** | **Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)** | **18,33** | **20** |  | **20** |  | | **20** |  | | **21** |  | | **21** |  | **21** |  |  |
| 3 | 7 | 33 | Program Peningkatan dan Pengembangan Industri | Presentase Pertumbuhan Industri Olahan (%) | 0,23 | 1 | 2,529,800,000 | 1 | 4,080,000,000 | | 1 | 4,692,000,000 | | 1 | 5,395,810,000 | | 1,5 | 6,205,170,000 | 1,5 | 22,902,780,000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
|  |  |  | **Sasaran 11 : Meningkatnya realisasi investasi** | **Nilai realisasi investasi (Rp Triliun)** | **25,53** | **31,5** |  | **33,08** |  | | **34,73** |  | | **36,47** |  | | **38,29** |  | **38,29** |  |  |
| 2 | 12 | 18 | Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan | Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (hari) | 15 | 14 | 221,000,000 | 13 | 1,500,000,000 | | 12 | 1,520,000,000 | | 11 | 1,600,000,000 | | 10 | 1,600,000,000 | 10 | 6,441,000,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | 12 | 27 | Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi | Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri (perusahaan industri baru) | 0 | 25 | 509,400,000 | 7 | 1,590,000,000 | | 7 | 2,000,000,000 | | 7 | 2,250,000,000 | | 7 | 2,570,000,000 | 7 | 8,919,400,000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|  |  |  | **Sasaran 12 : Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah** | **Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)** | **0.52** | **0.53** |  | **0.54** |  | | **0.55** |  | | **0.56** |  | | **0.57** |  | **0.57** |  |  |
|  |  |  | **Rasio Pemenuhan Beras (%)** | **57,91** | **75,43** |  | **77,62** |  | | **79,94** |  | | **82,02** |  | | **85,16** |  | **85,16** |  |  |
| 3 | 3 | 51 | Program Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan | Jumlah produksi padi (Ton) | 383,958 | 403,000 | 11,471,580,000 | 423,000 | 13,550,000,000 | | 444,000 | 13,550,000,000 | | 466,000 | 15,150,000,000 | | 495,000 | 14,550,000,000 | 495,000 | 68,271,580,000 | DPTPH |
| 3 | 3 | 41 | Program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura | Jumlah produksi tanaman hortikultura (Ton) | 226,017 | 233,020 | 3,020,600,000 | 240,245 | 3,700,000,000 | | 247,698 | 3,700,000,000 | | 255,387 | 3,950,000,000 | | 263,320 | 3,700,000,000 | 263,320 | 18,070,600,000 | DPTPH |
|  |  |  | **Sasaran 13 : Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah** | **Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)** | **0.3** | **0.33** |  | **0.34** |  | | **0.35** |  | | **0.36** |  | | **0.37** |  | **0.37** |  |  |
| 3 | 3 | 34 | Program Pengembangan Usaha Peternakan | Jumlah Miniranch yang Teregister (unit) | 0 | 5 | 5,800,000,000 | 35 | 10,250,000,000 | | 40 | 11,670,000,000 | | 35 | 7,400,000,000 | | 35 | 7,600,000,000 | 150 | 42,720,000,000 | Dinas Peternakan |
| 3 | 3 | 90 | Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan | Angka Kelahiran Sapi (%) | 19 | 20 | 7,000,000,000 | 20 | 24,100,000,000 | | 20.5 | 7,100,000,000 | | 21 | 7,700,000,000 | | 22 | 8,300,000,000 | 22 | 54,200,000,000 | Dinas Peternakan |
|  |  |  | **Sasaran 14 : Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah** | **Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)** | **4.49** | **5.1** |  | **5.4** |  | | **5.7** |  | | **6** |  | | **6.3** |  | **6.3** |  |  |
| 3 | 3 | 58 | Program Peningkatan Produksi Perkebunan | Produksi Komoditi Perkebunan (Ton) | 13,249,959 | 15288465 Ton | 14,977,395,000 | 16812938 Ton | 21,805,111,250 | | 17136849 Ton | 16,717,791,000 | | 18126358 Ton | 16,717,791,000 | | 18313874 Ton | 18,472,673,000 | 18313874 Ton | 88,690,761,250 | Dinas Perkebunan |
| 3 | 3 | 80 | Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan | Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) (Perusahaan) | 98 | 35 | 542,400,000 | 35 | 1,010,821,250 | | 35 | 1,010,821,000 | | 35 | 1,150,000,000 | | 35 | 1,537,331,000 | 140 | 5,251,373,250 | Dinas Perkebunan |
| 3 | 3 | 93 | Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan | Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,251,383,750 | | 2 | 2,251,383,000 | | 3 | 2,400,000,000 | | 3 | 3,424,072,000 | 10 | 10,326,838,750 | Dinas Perkebunan |
| 3 | 3 | 76 | Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan | Jumlah Penurunan Emisi Sektor Perkebunan (Juta Ton C02eq) | 1,87 | 4,79 | 275,800,000 | 4,08 | 977,500,000 | | 4,07 | 977,500,000 | | 4,06 | 1,020,000,000 | | 4,04 | 1,490,000,000 | 4,04 | 4,740,800,000 | Dinas Perkebunan |
|  |  |  | **Sasaran 15 : Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah** | **Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)** | **1,46** | **1,52** |  | **1,58** |  | | **1,64** |  | | **1,71** |  | | **1,78** |  | **1,78** |  |  |
| 3 | 1 | 25 | Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | 151.918 Ton | 154.956 Ton | 4,125,830,000 | 158.055 Ton | 5,555,000,000 | | 161.216 Ton | 6,110,500,000 | | 164.441 Ton | 6,721,550,000 | | 167.730 Ton | 6,721,550,000.00 | 167.730 Ton | 29,234,430,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 3 | 1 | 21 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | 149.039 Ton | 152.027 Ton | 15,396,907,000 | 155.516 Ton | 18,157,500,000.00 | | 158 938 Ton | 16,121,500,000.00 | | 162.593 Ton | 13,093,650,000.00 | | 166.170 Ton | 11,279,213,620.00 | 166.170 Ton | 74,048,770,620 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 3 | 1 | 29 | Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan | Jumlah Produksi Ketersediaan Benih (ekor) | 2,5 Miliar Ekor | 2,6 Miliar Ekor | 3,796,810,000 | 2,7 Miliar Ekor | 4,799,100,000 | | 2,8 Miliar Ekor | 5,111,750,000 | | 2,9 Miliar Ekor | 5,510,425,000 | | 3 Miliar Ekor | 4,789,100,000 | 3 Miliar Ekor | 24,007,185,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan (UPTD. Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar) |
| 3 | 1 | 26 | Program Pengelolaan Ruang Laut | Jumlah kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Kawasan) | 0 Kawasan | 1 Kawasan | 3,122,885,000 | 1 Kawasan | 3,795,000,000 | | 1 Kawasan | 4,174,500,000 | | 1 Kawasan | 4,591,950,000 | | 1 Kawasan | 4,591,950,000 | 1 Kawasan | 20,276,285,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
|  |  |  | **Sasaran 16 : Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah** | **Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)** | **1,15** | **1** |  | **1.05** |  | | **1.1** |  | | **1.15** |  | | **1.2** |  | **1.2** |  |  |
| 3 | 4 | 16 | Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan | Realisasi penerimaan PNBP sektor kehutanan (Rp. Miliar) | 167 | 160 | 3,471,960,000.00 | 165 | 3,471,960,000.00 | | 170 | 3,471,960,000.00 | | 175 | 3,471,960,000.00 | | 180 | 3,471,960,000.00 | 180 | 17,359,800,000 | Dinas Kehutanan |
| 3 | 4 | 41 | Program Perlindungan dan KSDAE | Persentase kerusakan hutan di dalam kawasan hutan (%) | ≤2 | ≤2 | 782,100,000.00 | ≤1,75 | 782,100,000.00 | | ≤1,5 | 782,100,000.00 | | ≤1,25 | 782,100,000.00 | | ≤1 | 782,100,000.00 | ≤1 | 3,910,500,000 | Dinas Kehutanan |
| 3 | 4 | 39 | Program Pengelolaan DAS dan RHL | Persentase meningkatnya tutupan lahan (%) | 218 | 1398 | 1,194,850,000.00 | 1398 | 1,194,850,000.00 | | 1398 | 1,194,850,000.00 | | 1398 | 1,194,850,000.00 | | 1398 | 1,194,850,000.00 | 1398 | 5,974,250,000 | Dinas Kehutanan |
| 3 | 4 | 42 | Program Penyuluhan, pemberayaan masyarakat hutan dan perhutanan sosial | Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat (Ha) | 118,000 | 32,000 | 2,330,970,000.00 | 32,000 | 2,330,970,000.00 | | 32,000 | 2,330,970,000.00 | | 32,000 | 2,330,970,000.00 | | 32,000 | 2,330,970,000.00 | 32,000 | 11,654,850,000 | Dinas Kehutanan |
|  |  |  | **Sasaran 17 : Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah** | **Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah (%)** | **-8.16** | **3.84** |  | **3.84** |  | | **3.84** |  | | **3.84** |  | | **3.84** |  | **3.84** |  |  |
| 4 | 4 | 30 | Program Perencanaan dan pengembangan Sumber Pendapatan Daerah | Jumlah objek/sumber pendapatan baru | 0 | - | - | 4 | 3,946,999,000 | | 6 | 4,341,700,000 | | 8 | 4,775,871,000 | | 10 | 5,046,127,000 | 10 | 18,110,697,000 | Badan Pendapatan Daerah |
|  |  |  | **Misi 3 ; BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **Tujuan 5 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **Sasaran 18 : Meningkatnya aksesibilitas wilayah** | **Jumlah penumpang yang terlayani (orang)** | **10.392.536** | **10.705.000** |  | **11.026.000** |  | | **11.536.200** |  | | **11.700.000** |  | | **12.050.000** |  | **12.050.000** |  |  |
|  |  |  | **Jumlah barang (ton)** | **325.051.663** | **334.805.000** |  | **344.850.000** |  | | **355.200.000** |  | | **365.900.000** |  | | **376.900.000** |  | **376.900.000** |  |  |
| 2 | 9 | 19 | Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP | Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP (Unit/%) | 10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (83%) | 10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (83%) | 3,037,846,500 | 10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (85%) | 30,200,000,000 | | 11 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (88%) | 40,609,330,000 | | 11 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (90%) | 27,909,330,000 | | 10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (90,42%) | 27,909,330,000 | 10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (90,42%) | 129,665,836,500 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 9 | 15 | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan | Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (Kasus) | 854 | 683 | 4,375,614,000 | 598 | 21,800,000,000 | | 512 | 39,790,670,000 | | 427 | 29,590,670,000 | | 342 | 29,590,670,000 | 342 | 125,147,624,000 | Dinas Perhubungan |
|  |  |  | **Sasaran 19 : Meningkatnya konektivitas antar kawasan** | **Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (kawasan)** | **2** | **2** |  | **3** |  | | **3** |  | | **3** |  | | **6** |  | **6** |  |  |
| 1 | 3 | 15 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Tingkat kemantapan jalan provinsi (%) | 52,85 | 54,30 | 552,481,103,020 | 58,88 | 994,570,504,517 | | 63,46 | 1,329,828,399,770 | | 68,04 | 2,029,191,334,197 | | 72,62 | 2,661,831,219,624 | 72,62 | 7,567,902,561,128 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat |
|  |  |  | **Sasaran 20 : Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air** | **Cakupan layanan air minum (%)** | **71,83** | **73,33** |  | **75** |  | | **77** |  | | **81** |  | | **85** |  | **85** |  |  |
|  |  |  | **Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)** | **13.618,5** | **14.008,5** |  | **14.808,5** |  | | **15.558,5** |  | | **16.258,5** |  | | **16.925,5** |  | **16.925,5** |  |  |
|  |  |  | **Luas genangan banjir perkotaan (Ha)** | **730** | **664** |  | **575** |  | | **505** |  | | **435** |  | | **365** |  | **365** |  |  |
| 1 | 3 | 16 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Kapasitas Air Baku (L/detik) | 7922 | 7922 | 148,924,820,000 | 8322 | 216,507,097,018 | | 8622 | 256,652,331,562 | | 8622 | 301,998,744,857 | | 8982 | 347,763,677,742 | 8982 | 1,271,846,671,179 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat |
| 1 | 3 | 17 | Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan | Cakupan layanan Air Minum Perpipaan (%) | 60,23 | 62,23 | 258,960,950,000 | 65,23 | 223,724,000,251 | | 67,23 | 265,207,409,281 | | 71,23 | 312,065,369,686 | | 75,23 | 359,355,800,334 | 75,23 | 1,419,313,529,552 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat |
|  |  |  | **Sasaran 21 : Menurunnya kawasan kumuh** | **Luas Kawasan Kumuh (Ha)** | **673,42** | **620,06** |  | **533,56** |  | | **459,56** |  | | **409,56** |  | | **359,56** |  | **359,56** |  |  |
| 1 | 4 | 15 | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit) | 51,722 | 46,722 | 47,055,350,000 | 41,722 | 209,290,193,784 | | 36,722 | 248,097,253,843 | | 31,722 | 291,932,120,029 | | 26,722 | 336,171,555,151 | 26,722 | 1,132,546,472,807 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat |
|  |  |  | **Sasaran 22 : Terpenuhinya kebutuhan energi daerah** | **Rasio elektrifikasi (%)** | **84,21** | **85,50** |  | **87,50** |  | | **89,50** |  | | **92,00** |  | | **95,00** |  | **95,00** |  |  |
| 3 | 5 | 47 | Program Diversifikasi & Konservasi Energi | Persentase pemanfaatan EBT (%) | 3,13 | 3,38 | - | 3,63 | 47,692,828,000 | | 4,13 | 47,692,828,000 | | 4,63 | 47,692,828,000 | | 5,13 | 47,692,828,000 | 5,13 | 190,771,312,000 | DESDM |
| 3 | 5 | 37 | Program Pengembang an Ketenagalistrikan | Jumlah KK Berlistrik (KK) | 945,607 | 965,607 | 1,723,350,000 | 989,607 | 11,000,000,000 | | 1.018.607 | 11,000,000,000 | | 1.041.607 | 11,000,000,000 | | 1.078.607 | 11,000,000,000 | 1.078.607 | 45,723,350,000 | DESDM |
|  |  |  | **Misi 4 ; BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **Tujuan 6 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **Sasaran 23 : Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)** | **Persentase penurunan emisi dari BAU (%)** | **7.2** | **26.3** |  | **26.89** |  | | **27.75** |  | | **28.5** |  | | **29.33** |  | **29.33** |  |  |
| 2 | 5 | 59 | Program Tata Lingkungan | Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan (aksi) | 417 | 500 | - | 550 | 4,600,000,000 | | 600 | 4,704,699,000 | | 640 | 4,800,000,000 | | 670 | 4,800,000,000 | 670 | 18,904,699,000 | DLH |
| 2 | 5 | 26 | Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | Indeks Pencemaran Lingkungan | Tercemar sedang (8) | 0 | 0 | Tercemar sedang (8) | 5,765,090,000 | | Tercemar sedang (8) | 3,865,980,000 | | Tercemar sedang (8) | 4,000,000,000 | | Tercemar sedang (8) | 4,000,000,000 | Tercemar sedang (8) | 17,631,070,000 | DLH |
|  |  |  | **Sasaran 24 : Meningkat nya Ketangguhan Menghadapi Bencana** | **Indeks Resiko Bencana** | **0** | **145** |  | **140** |  | | **135** |  | | **130** |  | | **125** |  | **125** |  |  |
| 1 | 5 | 51 | Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah | Persentase desa/kelurahan tangguh bencana (%) | 60 | 60 Persen | 225,000,000 | 25 Persen | 1,225,000,000 | | 50 Persen | 1,325,000,000 | | 75 Persen | 1,275,000,000 | | 100 Persen | 1,274,000,000 | 100 Persen | 5,324,000,000 | BPBD |
| 1 | 5 | 49 | Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana | Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah dalam Penanganan Bencana (%) | 85 Persen | 87 Persen | 355,020,000 | 88 Persen | 1,785,920,000 | | 89 Persen | 1,785,920,000 | | 90 Persen | 1,785,920,000 | | 91 Persen | 1,785,920,000 | 91 Persen | 7,498,700,000 | BPBD |
|  |  |  | **Sasaran 25 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang** | **Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)** | **73,18** | **66,68** |  | **69,01** |  | | **75,09** |  | | **80,09** |  | | **83,09** |  | **83,09** |  |  |
| 1 | 3 | 70 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase Kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota (%) | 63,19 | 64,87 | 6,297,172,500 | 75,34 | 21,650,709,702 | | 77,19 | 25,665,233,156 | | 90 | 30,199,834,486 | | 96,82 | 34,776,367,774 | 96,82 | 118,589,317,618 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat |
|  |  |  | **Misi 5 ; BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **Tujuan 7 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **Sasaran 26 : Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien** | **Nilai Akuntabilitas Kinerja** | **77,49** | **77,50** |  | **78,00** |  | | **78,50** |  | | **79,00** |  | | **80,00** |  | **80,00** |  |  |
| 4 | 1 | 60 | Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja | Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah yang memperoleh predikat minimal B (Baik) (%) | 71,05 | 73 | 2,974,660,000 | 75 | 2,547,303,400 | | 77 | 2,198,578,969 | | 79 | 1,832,418,318 | | 81 | 1,447,949,632 | 81 | 11,000,910,319 | Biro Organisasi (SETDA) |
| 4 | 1 | 80 | Program Penguatan Kelembagaan | Persentase PD yang dibentuk sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria (%) | 86 | 87 | 1,145,920,000 | 90 | 1,203,216,000 | | 92 | 1,263,376,800 | | 95 | 1,326,545,640 | | 97 | 1,392,872,923 | 97 | 6,331,931,363 | Biro Organisasi (SETDA) |
| 4 | 3 | 48 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Presentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan melalui dokumen anggaran | 78,53 | 80 | 7,085,850,000 | 85 | 8,585,850,000 | | 90 | 7,385,850,000 | | 95 | 8,585,850,000 | | 100 | 8,585,850,000 | 100 | 40,229,250,000 | Bappeda |
|  |  |  | **Sasaran 27 : Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas** | **Skor Kepuasan Masyarakat (SKM)** | **80,56** | **81** |  | **81,50** |  | | **82** |  | | **82,50** |  | | **83** |  | **83** |  |  |
| 4 | 1 | 42 | Program Peningkatan Pelayanan Publik | Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar (%) | 49 | 50 | 906,920,000 | 61 | 952,266,000 | | 71 | 999,879,300 | | 79 | 1,049,873,265 | | 89 | 1,102,366,929 | 89 | 5,011,305,494 | Biro Organisasi (SETDA) |
| 4 | 1 | 81 | Program Tata Laksana Pemerintahan | Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP sesuai ketentuan/aturan (%) | 52,63 | 60,53 | 224,960,000 | 68.42 | 236,208,000 | | 78.95 | 248,018,400 | | 89.47 | 260,419,320 | | 92 | 273,440,286 | 92 | 1,243,046,006 | Biro Organisasi (SETDA) |
| 2 | 10 | 15 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 0 | 2,6 | 2,143,730,000 | 2,8 | 3,601,000,000 | | 3 | 3,571,000,000 | | 3,2 | 3,731,000,000 | | 3,5 | 3,991,000,000 | 3,5 | 17,037,730,000 | Diskominfo |
|  |  |  | **Sasaran 28 : Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel** | **Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda** | **Level 2** | **Level 3** |  | **Level 3** |  | | **Level 3** |  | | **Level 3** |  | | **Level 4** |  | **Level 4** |  |  |
| 4 | 2 | 99 | Pencegahan KKN | Hasil Penilaian Integritas | 60 | 65 | 2,322,305,000 | 70 | 2,522,305,000 | | 75 | 2,522,305,000 | | 80 | 2,522,305,000 | | 85 | 2,522,305,000 | 85 | 12,411,525,000 | Inspektorat |
| 4 | 2 | 21 | Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | Level kapasitas APIP | 2 | 3 | 2,767,000,000 | 3 | 2,767,000,000 | | 3 | 2,767,000,000 | | 3 | 2,767,000,000 | | 4 | 2,767,000,000 | 4 | 13,835,000,000 | Inspektorat |

* 1. **Dinamika Pembangunan di Kalimantan Timur**

Rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur lima tahun mendatang. Pemetaan dinamika pembangunan yang baik, menjadi dasar bagi perumusan intervensi yang komprehensif. Dinamika pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang.

Dinamika pembangunan dibagi menjadi dinamika pembangunan nasional dan dinamika pembangunan daerah khususnya Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan pemerintahan serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan, terdapat beberapa permasalahan dinamika utama pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Dinamika pembangunan daerah merupakan persoalan pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian khusus, isu ini disusun berdasarkan analisis situasi capaian pembangunan dan memiliki dampak luas terhadap suatu pembangunan. Dinamika tersebut berasal dari munculnya isu strategis yang bias dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka pendek dan panjang. Dinamika pembangunan dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat mempengaruhi agenda pembangunan dalam lima tahun ke depan. Di samping itu, isu strategis mengacu pada capaian kinerja daerah 5 tahun sebelumnya, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kebijakan Pembangunan Nasional dan Isu Internasional yang relevan.

**Dinamika Pembangunan Berdasarkan Isu Internasional**

Dinamika pembangunan secara nasional diarahkan untuk mempertimbangkan dinamika internasional. Meskipun berada dalam level provinsi, perencanaan pembangunan tidak terlepas juga dari isu krusial di level internasional. Beberapa isu strategis di bawah ini dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan konteks Provinsi Kalimantan Timur.

1. **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals)***

Tujuan-tujuan yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals)* merupakan penyempurnaan tujuan pembangunan *Millenium Development Goals*. Melalui mandat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Negara-negara dalam organisasi PBB berkomitmen untuk berupaya mewujudkan sumberdaya manusia global yang berkualitas, meningkatkan perekonomian global yang tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk 2016-2030 meliputi :

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup, 17 Tujuan dan 169 target sebagaimana tertuang dalam agenda SDGs dinilai sangat relevan untuk konteks pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu, Provinsi Kalimantan Timur juga berkomitmen untuk melaksanakan agenda-agenda SDGs yang targetnya dapat tercapai pada tahun 2030.

1. **Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah memasuki dukungan terhadap implementasi industri. Dengan ketersediaan teknologi tersebut, kemanfaatan dapat diambil oleh pemerintah, karena informasi dapat terdistribusi dan diterima dengan lebih cepat. Bagi Provinsi Kalimantan Timur, teknologi komunikasi dan informasi (TIK) penting untuk mendukung partisipasi, akuntablitasi, dan transparansi pembangunan daerah. Pembangunan lima tahun kedepan juga diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Tentu dalam membangun sektor ini juga tidak bisa lepas dari peran sektor-sektor lain termasuk kondisi infrastruktur energi listrik dan jaringan komunikasi.

1. **Pembangunan Ekonomi Hijau *(Green Economy)***

Pembangunan ekonomi global saat ini sudah mulai bergeser ke konsep *green economy*, yaitu ekonomi ekologis. Ekonomi hijau mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan tidak mengenyampingkan kepentingan ekologi dan sosial-budaya masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan dalam ekonomi hijautersebut menjadi pedoman perubahan paradigma pembangunan. Pertumbuhan ekonomi harus didukung keberlanjutan ekologi. Hal penting yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung perkembangan ekonomi hijau tersebut adalah dalam level perencanaan pembangunan dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan minimalisir dampak lingkungannya.

Kalimantan Timur dapat melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau melalui intensifikasi Kawasan melalui peningkatan produktivitas, serta memastikan kawasan-kawasan penting secara ekologis dan sosial-budaya tetap dapat eksis. Misalnya pada sektor perkebunan, dilakukan dengan mendorong pelaksanaan perkebunan berkelanjutan, dengan memanfaatkan lahan bercadangan karbon rendah untuk pengembangan perkebunan, menjaga kawasan bernilai konservasi tinggi, serta memastikan peningkatan produktivitas tanaman perkebunan. Pada sektor perikanan dilakukan dengan mendorong budidaya perikanan darat yang tidak membuka seluas-luasnya Kawasan berhutan, namun dilakukan dengan integrase perikanan dan hutan (aquasilviculture), serta menetapkan dan mengelola kawasan perlindungan bagi perbenihan biota air di alam (*reservat*).

1. **Perjanjian Paris terkait Perubahan Iklim (Paris Agreement)**

Negara-negara di dunia yang tergabung dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), pada pertemuan para pihak ke-21 bulan Desember 2015, telah menyepakati Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1.5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. 5 (lima) kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu:

1. Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius.
2. Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan.
3. Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
4. Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim.
5. Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui “Katowice Climate Package” yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris. Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa. Hal tersebut menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

1. **Penguatan Pusat Pertumbuhan Wilayah**

Tingkat keberhasilan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagai Pusat Pertumbuhan Baru di Kalimantan Timur masih rendah, hanya 2 KSP yang berkembang dengan pesat dari 7 KSP yang ada, yaitu Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat di Bontang dan Kawasan Industri, Perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda. Infrastruktur pendukung konektifitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan di beberapa KSP masih belum optimal, terutama terkait dengan jaringan air bersih, telekomunikasi dan transportasi.

Penguatan Kawasan Strategis Provinsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daaerah perlu dilakukan melalui peningkatan akses dan konektifitas antar kawasan untuk mendukung percepatan realisasi investasi industri pengolahan produk unggulan daerah pada masing-masing kawasan. Di samping itu pula pengembangan sosial ekonomi perdesaan, wilayah pedalaman dan tertinggal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konektifitas antar kawasan.

1. **Peningkatan Daya Saing Daerah**

Kebutuhan akan peningkatan daya saing daerah dilatarbelakangi oleh pengalaman perekonomian Kalimantan Timur yang menghadapi tantangan cukup berat, dimana pada periode tahun 2015-2016 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami penurunan yang sangat tajam. Rendahnya kondisi daya saing daerah disebabkan oleh pengaruh eksternal buruknya kinerja perekonomian nasional yang tercermin dalam kinerjanya di perdagangan internasional, investasi, ketenagakerjaan dan stabilitas harga.

Disamping itu, pengaruh internal terhadap rendahnya daya saing daerah antara lain :

* Buruknya efisiensi kelembagaan pemerintahan dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal, pengembangan berbagai peraturan dan perundangan untuk iklim usaha kondusif, lemahnya kordinasi akibat kerangka institusi publik yang masih banyak tumpang tindih dan kompleksitas struktur sosialnya.
* Lemahnya efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produksi dan inovasi secara bertanggungjawab yang tercermin dari tingkat produktivitas yang rendah, pasar tenaga kerja yang belum optimal, akses ke sumberdaya keuangan yang masih rendah serta praktik dan nilai manajerial yang relatif belum profesional.
* Keterbatasan infrastruktur, baik infrastruktur fisik, teknologi dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan kesehatan.

Tantangan ke depan yang akan dihadapi semakin berat, yaitu adanya globalisasi ekonomi yang ditandai dengan perdagangan dan industri yang berlaku tanpa batas (borderless). Kemampuan bersaing (daya saing) menjadi ujung tombak agar sektor-sektor ekonomi dapat tetap tumbuh dan berkembang dan memberikan kesejahteraan masyarakat. Keunggulan, inovasi, dan antisipasi merupakan tiga kunci pokok dalam menghadapi globalisasi. Keunggulan berhubungan dengan kualitas yang dimiliki, inovasi merupakan perubahan strategis yang dilakukan, serta antisipasi adalah bagaimana mengantar pelayanan sesuai timing-nya.

Peningkatan daya saing ekonomi daerah bertujuan untuk memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan sektor unggulan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah daerah dalam mengupayakan daya saing daerah menjadi sangat penting dan strategis. Peningkatan daya saing dilakukan melalui upaya terpadu antara pemerintah pusat, daerah dan swasta dalam mendukung kemandirian daerah, tidak hanya berorientasi pada indikator perekonomian saja, melainkan lebih luas meliputi seluruh upaya mengelola sumber daya yang dimiliki, meliputi :

* Memperkuat kelembagaan dan tatakelola pemerintahan daerah meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Peningkatan inovasi pemerintahan daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah baru dan pengembangan investasi, penataan pola hubungan kerja sama antara Pusat-daerah dan antar daerah, serta kolaborasi multipihak swasta.
* Meningkatkan produktivitas ekonomi rakyat dan daya saing di pasar nasional dan internasional dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
* Meningkatkan pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar, pendidikan dan kesehatan melalui percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama di daerah pedalaman dan tertinggal.

1. **Pemanfaatan Ruang**

Daya dukung dan daya tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (*Carrying Capacity*) menjadi pertimbangan dalam kebijakan pembangunan kewilayahan. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kalimantan Timur menjadi sangat penting dan strategis untuk peningkatan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan daerah berkelanjutan. Ruang wilayah Kalimantan Timur mengalami Konflik ruang yang semakin meningkat, dimana terdapat 4,86 juta Ha tumpang tindih lahan perijinan antara kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Kesemrawutan pemanfaatan ruang wilayah Kalimantan Timur telah menyebabkan ketidakstabilan kondisi sosial dan ekonomi. Kehutanan, perkebunan dan pertambangan telah menguasai + 88,47 % lahan di Kalimantan Timur, namun ketiga sektor tersebut membentuk struktur ekonomi daerah yang kurang kokoh, dan sangat rentan terhadap pengaruh perekonomian global.

Disamping itu, permukiman di kawasan perdesaan dalam kawasan hutan, perkebunan besar, dan konsesi pertambangan tidak dapat optimal dalam mengelola lahan dan akses pelayanan infrastruktur dasar juga terbatas. Penduduk miskin Kalimantan Timur sebagian besar berada dalam kawasan yang tumpang tindih tersebut. Sementara dilain pihak, Pemerintahan Desa belum dapat optimal melaksanakan kewenangannya terutama untuk pembangunan infrastruktur melalui dana desa pada kawasan-kawasan tersebut. Degradasi lingkungan juga semakin meningkat, dimana kejadian bencana semakin sering terjadi akibat pemanfaatan ruang yang tidak terkendali seperti banjir dan tanah longsor. Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan untuk mengendalikan kegiatan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Pengendalian pemanfaatan ruang perlu diarahkan pada penataan kembali pola pengelolaan Sumber Daya Alam melalui pengendalian perijinan investasi dengan mempertimbangkan kapasitas regenerasi sumber daya alam dan keragaman lingkungan hidup, penegakan penataan ruang yang berbasis kebencanaan, peningkatan kepastian hukum hak atas tanah.

Dengan adanya investasi pemanfaatan ruang yang mampu mengolah sumber daya alam secara lestari, maka ekonomi daerah akan berputar, ada penyerapan tenaga kerja, ada nilai tambah, ada profit, ada pajak dan ada multiplier effect untuk daerah, yang selanjutnya diharapkan akan mampu mempersempit ketimpangan antar wilayah dan ketimpangan pendapatan masyarakat. Harmonisasi Peraturan Perundangan terkait pemanfaatan ruang merupakan faktor kunci yang mampu mendorong upaya penurunan ketimpangan antar wilayah.

1. **Peningkatan daya saing sumber daya manusia**

Peningkatan daya saing sumber daya manusia perlu dilakukan melalui penyediaan Lembaga pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan tenaga sektor pertanian dalam arti luas dan dan industri hilir pengolahan. Selain itu, juga dilakukan penurunan kesenjangan kualitas Lembaga pendidikan dan tenaga pendidik, baik melalui peningkatan jumlah maupun pemenuhan kualitas dan standar kompetensi tenaga pendidik. Kesejahteraan tenaga pendidik menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam lima tahun mendatang, melalui pemberian tunjangan dan hal lain yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam memastikan peningkatan daya saing.

Peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja dengan orientasi industri pertanian dan hasil pertanian dalam arti luas, serta menumbuhkan kewirausahaan baru, menjadi bagian penting dalam menjawab lemahnya daya saing.

Keadilan pendidikan ini juga disertai dengan keadilan kesehatan dan jaminan sosial, agar setiap warga Kalimantan Timur dapat memperoleh kesejahteraan yang berkeadilan. Pengintegrasian nilai keagamaan dan nilai budaya dalam Lembaga pendidikan juga menjadi agenda utama dalam memenuhi sumber daya manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia. Kelompok-kelompok khusus, seperti perempuan, disabilitas, warga miskin, serta pemuda, menjadi fokus perhatian dalam pembangunan sumber daya manusia lima tahun mendatang.

1. **Peningkatan daya saing sumber daya manusia**

Peningkatan daya saing sumber daya manusia perlu dilakukan melalui penyediaan Lembaga pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan tenaga sektor pertanian dalam arti luas dan dan industri hilir pengolahan. Selain itu, juga dilakukan penurunan kesenjangan kualitas Lembaga pendidikan dan tenaga pendidik, baik melalui peningkatan jumlah maupun pemenuhan kualitas dan standar kompetensi tenaga pendidik. Kesejahteraan tenaga pendidik menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam lima tahun mendatang, melalui pemberian tunjangan dan hal lain yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam memastikan peningkatan daya saing.

Peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja dengan orientasi industri pertanian dan hasil pertanian dalam arti luas, serta menumbuhkan kewirausahaan baru, menjadi bagian penting dalam menjawab lemahnya daya saing.

Keadilan pendidikan ini juga disertai dengan keadilan kesehatan dan jaminan sosial, agar setiap warga Kalimantan Timur dapat memperoleh kesejahteraan yang berkeadilan. Pengintegrasian nilai keagamaan dan nilai budaya dalam Lembaga pendidikan juga menjadi agenda utama dalam memenuhi sumber daya manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia. Kelompok-kelompok khusus, seperti perempuan, disabilitas, warga miskin, serta pemuda, menjadi fokus perhatian dalam pembangunan sumber daya manusia lima tahun mendatang.

1. **Percepatan Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan secara vertikal maupun horizontal**

Mengingat semakin langka dan menurunnya sumber daya alam tidak terbarukan, seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara, serta semakin menurunnya harga pasar komoditi tersebut, menjadikan masa depan Provinsi Kalimantan Timur tergantung pada percepatan transformasi ekonomi dari sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan sebagai alternatif unggulan ekonomi Kalimantan Timur. Pengembangan ekonomi sumber daya alam terbaharukan dilakukan melalui optimasi produktivitas Kawasan dengan meningkatkan kemampuan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang diiringi dengan pengembangan industry hilir pengolahan hasil-hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Pengembangan industrialisasi sektor sumber daya alam terbarukan diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan asli daerah, dan menciptakan ekspor non migas yang memberikan nilai tambah perekonomian daerah.

Menggerakkan ekonomi alternatif non-kayu sebagai produk unggulan kehutanan, yang disertai dengan penguatan pada pengembangan industri pengolahannya, dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi Kalimantan Timur. Selain itu, pengurangan kemungkinan kehilangan pendapatan pada jalur distribusi dan perdagangan hasil pertanian dalam arti luas, menjadi kunci dalam meningkatkan pendapatan daerah, termasuk pendapatan asli daerah. Pengembangan sentra perikanan modern dan pariwisata pada Kawasan danau Jempang, Semayang dan Melintang di Daerah Aliran Sungai Mahakam, dan kawasan sepanjang pesisir timur, dapat menjadi potensi yang besar dalam memberikan kontribusi perekonomian makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkerakyatanmenjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak.

1. **Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas infrastruktur wilayah**

Penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat, serta pada memberikan dukungan yang baik terhadap tumbuhnya pusat-pusat produksi pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan di Kalimantan Timur. Ketersediaan perumahan yang layak huni, air baku dan air minum bersih, serta listrik, dan disertai dengan infrastruktur jalan dan jembatan, serta fasilitas perhubungan pelayarah, menjadi perhatian penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.

Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang termuat di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, dikuatkan oleh infrastruktur yang memadai, menjadi denyut nadi tranformasi ekonomi hijau Kalimantan Timur.

1. **Rencana Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)**

Rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur merupakan bagian dari dinamika pembangunan yang baru dilaksanakan pada tahun 2019 sehingga menjadi perhatian daerah terkait pembangunan dan penataan kawasan ekonomi yang ada di Kalimantan Timur. Rencana ini didasarkan dengan alasan pertama karena Jawa sudah mulai padat lebih dari separuh penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa yang luasnya lebih kecil dibandingkan Papua, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Dampak kepadatan penduduk ini menimbulkan permasalahan terutama dari sisi ketersediaan air bersih dan pangan. Rencana yang dianggarkan dalam pembangunan fasiltas yang menjadi ibu kota negara ini mencapai Rp 466 triliun, sedangkan skenario kedua Rp 323 triliun. Pembiayaan itu akan bersumber dari empat pihak, yaitu APBN, BUMN, KPBU, dan swasta. Menurut dia, APBN akan difokuskan untuk infrastruktur pelayanan dasar hingga pembangunan Istana Negara.

Rencana pemindahan Ibu Kota telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 edisi revisi bulan Juni 2019 Proyek ini berada dalam program prioritas nasional nomor 2 dengan rencana pembangunan dimulai pada tahun 2020 dan 2024 mulai proses pemindahan. Untuk zonasi kawasan inti pusat pemerintahan (2.000 hektare) akan berisi Istana, kantor lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), taman budaya, dan kebun raya.

Tahapan berikut, yaitu 2025-2029, akan dibangun sejumlah properti di kawasan ibu kota negara (40.000 ha) antara lain perumahan ASN/TNI/Polri, fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga pangkalan militer.  Tahap berikut, yaitu 2030-2045 akan dibangun sejumlah instrumen berupa taman nasional, konservasi orang utan, klaster permukiman non-ASN, dan wilayah pengembangan terkait dengan wilayah provinsi sekitarnya. Ada dua zonasi dalam tahap ini, yaitu kawasan perluasan IKN I (200.000 ha) dan kawasan perluasan IKN II (lebih dari 200.000 ha).

1. **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

Kalimantan Timur masih memiliki hutan alam yang cukup luas, yang merupakan benteng pertahanan terakhir bagi ekologi dan sosial-budaya Kalimantan Timur. Kawasan-kawasan berhutan, baik di dalam Kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan, harus terus dikelola keberadaannya. Pengembangan ekonomi produktif dari pertanian dalam arti luas difokuskan pada lahan-lahan bercadangan karbon rendah, serta pada wilayah yang potensial dalam meningkatkan produkvitas hasil pertanian.

Pengelolaan dan pemanfaatan limbah industri, termasuk pengembangan energi baru terbaharukan dari limbah-limbah pertanian, menjadi alternatif dalam pemenuhan energi dan menurunkan emisi GRK.

Dalam hal menurunkan ancaman risiko bencana di Kalimantan Timur, dilakukan peningkatan kapasitas daerah dalam mengantisipasi bencana, diantaranya melalui pembatasan kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan bencana, Desa Tangguh bencana, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, penguatan sarana-prasarana, serta pengembangan sistem tanggap darurat, dan penguatan kapasitas peringatan dini.

1. **Pemerintahan yang profesional dan akuntabel**

Tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur telah berada pada kondisi yang cukup baik jika didasarkan pada capaian indikator pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan, terkait optimalisasi akuntabilitas kinerja baik secara administratif maupun sosial.

Sebagai Provinsi yang dikenal memiliki kekayaan alam melimpah, penyelenggaraan pemerintahan banyak disorot karena memiliki peluang terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan daerah dan kebocoran pendapatan daerah. Pemerintahan Daerah harus mengantisipasi adanya penyimpangan dengan memperkuat sikap politik dalam penegakan hukum yang baik, dan memperkuat profesionalitas pemerintahan. Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur juga hendaknya meningkatkan integritas diri dan integritas lembaga menuju pada wilayah/zona bebas korupsi.

Pemerintahan yang professional dan akuntabel memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dengan melihat berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi, pemerintahan yang profesional dan akuntabel menjadi isu penting untuk diprioritaskan.

1. **Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018.**

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi SPM untuk urusan wajib terutama pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan social. Berdasarkan capaian Pembangunan Kalimantan Timur , masih banyak urusan wajib yang belum diselesaikan dengan baik dikarenakan keterbatasan sumberdaya. Selain itu, belum seluruh kementerian teknis menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan SPM.

Sementara di daerah, Kalimantan Timur juga menghadapi masalah dan isu strategis dalam penerapan SPM sebagai berikut :

1. Kapasitas daerah dalam tahap persiapan rencana pencapian SPM belum dipetakan secara menyeluruh;

2. Kapasitas Daerah dalam pengintegrasiaan rencana dan dokumen perencanaan SPM masih dihadapkan pada permasalahan lemahnya pemahaman aparatur daerah;

3. Kapasitas daerah dalam pembelanjaan penerapan SPM masih dihadapkan pada terbatasnya kemampuan keuangan daerah;

4. Kapasitas daerah dalam tahap penyampaian informasi masih dihadapkan pada kurangnya data dan informasi terkait pencapaian indikator-indikator kinerja SPM.



* 1. **Metodologi Evaluasi**

Metologi evalusi RPJMD 2019-2023 Tahun pertama ini menggunakan 2 (dua) metode evaluasi yaitu

1. Metode Kuantitatif.

**Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Terhadap Target Akhir RPJMD**

1. Tipe I

**Dimana:**

Performance Achievements : Capaian kinerja (%)

Realization : Realisasi / Capaian (%)

Plan : Rencana / Target (%)

**Keterangan:**

Semakin tinggi persentase capaian kinerja (performance achievements) menunjukkan pencapaian kinerja dan kondisi yang semakin baik (positif)

| **No** | **Kriteria Penilaian Capaian Kinerja** | **Deskripsi** | **Simbol** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sangat tinggi | Persentase capaian kinerja s/d tahun pertama (2019-triwulan 3) dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2023) antara 91 % s/d 100 % |  | Dasar perhitungan yang digunakan adalah persentase capaian kinerja tahun 2019 di triwulan 3 dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2023) |
| 2 | Tinggi | Persentase capaian kinerja s/d tahun pertama (2019-triwulan 3) dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2023) antara 76% s/d 90% |  |
| 3 | Sedang | Persentase capaian kinerja s/d tahun pertama (2019-triwulan 3) dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2023) antara 66 % s/d 75 % |  |
| 4 | Rendah | Persentase capaian kinerja s/d tahun pertama (2019-triwulan 3) dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2023) antara 51% s/d 65 % |  |
| 5 | Sangat Rendah | Persentase capaian kinerja s/d tahun pertama (2019-triwulan 3) dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2023) kurang dari s/d 50% |  |

1. Tipe II

**Dimana:**

Performance Achievements : Capaian kinerja (%)

Realization : Realisasi / Capaian (%)

Plan : Rencana / Target (%)

**Keterangan:**

Semakin tinggi persentase menunjukkan pencapaian kinerja dan kondisi yang semakin buruk (negatif)

| **No** | **Kriteria Penilaian Kinerja** | **Deskripsi** | **Simbol** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sangat tinggi | Persentase capaian kinerja s/d tahun pertama (2019-triwulan 3) dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2023) kurang dari s/d 50 % |  | Dasar perhitungan yang digunakan adalah persentase capaian kinerja tahun 2019 di triwulan 3 dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2023) |
| 2 | Tinggi | Persentase capaian kinerja s/d tahun pertama (2019-triwulan 3) dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2023) antara 51% s/d 65 % |  |
| 3 | Sedang | Persentase capaian kinerja s/d tahun pertama (2019-triwulan 3) dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2023) antara 66 % s/d 75 % |  |
| 4 | Rendah | Persentase capaian kinerja s/d tahun pertama (2019-triwulan 3) dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2023) antara 76% s/d 90% |  |
| 5 | Sangat Rendah | Persentase capaian kinerja s/d tahun pertama (2019-triwulan 3) dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2023) antara 91 % s/d 100 % |  |

2. Metode Kualitatif

Metode kualitatif ini digunakan untuk memfokuskan proses evaluasi. Sda beberapa hal yang dilakukan dalam menerapkan metode ini antara lain wawancara mendalam (indepth interview), diskusi kelompok terarah (focus group discussion), pengamatan (observation) dan pemetaan masyarakat (mapping community).

* 1. **Sistematika Evaluasi**

Evaluasi RPJMD Kalimantan Timur 2019-2023 Tahun pertama ini dilakukan mulai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun pada tahap paska pelaksanaan berdasarkan progress pelapuran SKPD. Berikut sistematika evaluasi yang dilakukan terhadap evaluasi RPJMD 2019-2023 Tahun pertama:

**Tabel 1.6. Tahapan Pelaksanaan Evaluasi RPJMD Kalimantan Timur 2019-2023 Tahun Pertama**

| Tahapan Perencanaan | Tahapan Pelaksanaan | Tahapan Pasca Pelaksanaan |
| --- | --- | --- |
| * Dilaksanakan pada saat penyelarasan rencana pembangunan SKPD | * Dilakukan pada saat pelaksanaan RPJMD, RKPD, dan Renja perangkat daerah | * Dilaksanakan setelah pelaksanaan RPJMD, RKPD dan Renja perangkat daerah (triwulan 4) setiap tahun anggaran |
| * Penentuan program prioritas dari berbagai alternatif dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kaltim | * Untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanan RPJMD, RKPD dan Renja perangkat daerah dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya | * Untuk mereview apakah pencapaian (Keluaran/hasil/dampak) program mampu pencapaian Visi dan Misi dan mengatasi masalah pembangunan |
|  |  | * Untuk menilai efisiensi (Keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (Hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (Dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program prioritas yang telah terdokumentasi di RPJMD |

Dalam pelaksanaan evaluasi RPJMD 2019-2023 Tahun pertama ini dilakukan dengan memperhatikan 7 (tujuh) aspek :

1. Menentukan tujuan evaluasi yaitu untuk mengetahui dampak kebijakan terutama terhadap program prioritas pembangunan dalam pencapaian visi dan misi dan untuk mengetahui capaian pelaksanaan suatu program RPJMD perangkat daerah
2. Menyusun desain evaluasi yang kredibel. Desain evaluasi yang dilakukan melalui metode pengumpulan data secara makro dan mikro, kemudian dilanjutkan dengan telaah dokumen RPJMD Kalimantan Timur 2019-2023 tahun pertama disertai dengan membandingkan parameter dan variabel dari program yang tertuang di RPJMD.
3. Mendiskusikan rencana evaluasi. Evaluasi disiapkan dan disepakati dengan tahapan pelaksanaan evaluasi terutama dalam hal evaluasi RPJMD 2019-2023 Tahun pertama disertai dengan time frame yang tersedia, tahap yang harus dilaksanakan, metode evaluasi yang digunakan, sumber data evaluasi program di RPJMD, pembiayaan evaluasi, tenaga ahli yang mengevaluasi dan proses desiminasi hasil evaluasi disertai dengan pemberian rekomendasi perbaikan.
4. Menentukan pelaku evaluasi. Pelaku evaluasi atau evaluator yang melakukan evaluasi RPJMD 2019-2023 tahun pertama adalah akademisi yang berasal dari Universitas Mulawarman, asosiasi ahli perencanaan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.
5. Melaksanakan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi dilakukan pada triwulan ke-4 (periode bulan Oktober – Desember)
6. Mendesiminasikan hasil evaluasi. Hasil evaluasi yang sudah dilaksanakan disertai dengan rekomendasi dan usulan perbaikan kebijakan untuk penyempurnaan program RPJMD 2019-2023 dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
7. Menggunakan hasil evaluasi. Hasil evaluasi yang sudah disertai dengan program usulan dan rekomendasi pencapaian visi dan misi dan telah didesiminasikan sebaiknya menjadi masukan perangkat daerah untuk bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dan kepentingan agar program prioritas dapat mencapai visi dan misi sesuai dengan alokasi tahun anggaran.

Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam bentuk seperti yang terdapat pada Tabel 1.7 di bawah ini:

**Tabel 1.7.** **Sistematika Evaluasi Pelaksanaan Realisasi RPJMD 2019-2023.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Efisiensi, Realisasi keuangan (%)** | | | |
| **Efektifitas capaian, Indikator (%)** |  | **< 80%** | **80% - 100%** | **> 100%** |
| **< 80%** | **Kombinasi 1**   * Cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator **ambisius** * Cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realistis) * Kemungkinan terdapat kelebihan/kekurangan anggaran | **Kombinasi 2**   * Cenderung tidak efektif dalam perencanaan target indikator **ambisius** * Cenderung tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realisis) * Kemungkinan terdapat kekurangan anggaran | **Kombinasi 3**   * Cenderung tidak efekif dalam perencanaan target indikator **ambisius** * Cenderung sangat tidak efisien dalam perencanaan anggaran (kurang realisis) * Kemungkinan terdapat kekurangan anggaran |
| **80% - 100%** | **Kombinasi 4**   * Perencanaan target indikator **cenderung efekif** * Perencanaan anggaran kurang realisis * Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran | **Kombinasi 5**   * Perencanaan target indikator **cenderung efekif** * Perencanaan anggaran cenderung efisien | **Kombinasi 6**   * Perencanaan target indikator **cenderung efekif** * Perencanaan anggaran kurang realisis * Kemungkinan terdapat kekurangan anggaran |
| **> 100%** | **Kombinasi 7**   * Perencanaan target indikator **pesimis** * Perencanaan anggaran kurang realisis (sangat tidak efisien) * Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran | **Kombinasi 8**   * Perencanaan target indikator **pesimis** * Perencanaan anggaran kurang realisis * Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran | **Kombinasi 9**   * Perencanaan target indikator **pesimis** * Perencanaan anggaran kurang realisis * Kemungkinan terdapat kelebihan/kekurangan anggaran |